

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV Diadit Media, Jakarta.
- Agustina, Shinta, 2016, *Penjelasan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, Jakarta.
- Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan, 2020, *Delik-Delik Korupsi Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2007, *Transformasi Status Hukum Uang Negara sebagai Teori Keuangan Publik yang Berdimensi Penghormatan terhadap Badan Hukum*, Bidang Studi HAN FH UI, Depok.
- _____, 2009, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2019, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Soft Media, Medan.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kaligis, O.C., 2010, *Korupsi Bibit & Chandra*, Penerbit Indonesia Against Injustice, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Minarno, Nur Basuki, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Nugraha, Safri, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945*, BPHN, Jakarta.
- Nugroho, Riant dan Randy R. Wrihatnolo, 2008, *Manajemen Privatisasi BUMN*, PT Gramedia, Jakarta .
- Pope, Jeremy *Strategi*, 2008, *Memberantas Korupsi*, Transparency International, Jakarta.
- R. Ridwan H., 2006, *Hukum Administrasi Negara Cetakan Kesatu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simatupang, Dian Puji N., 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Theobald, R, 1990, *Corruption, Development, and Underdevelopment*, Palgrave Macmillan, London.
- Wiyono, R., 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuntho, Emerson, Ilian Deta Arta Sari, Jeremiah Limbong, Ridwan Bakar, Firdaus Ilyas, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta.

Zega, Kevin D, 2020, *Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian atau Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Cahyono, Moh. Nurhadi dan Fadjar Judisiawan, “Menilik Alat Ukur Penilaian Kinerja BUMN”, *Jurnal Riset Kementerian BUMN*, Terbitan Kedua, Oktober 2011.

Hartono, Rizky Novian, Sriwati, dan Wafia Silvi Dhesinta Rini, “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, April 2021.

Hayyi, Muhammad Akram Syarif, Muhammad Said Karim, dan Aminuddin Ilmar, “Urgensi Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Terhadap Direksi BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, Mei 2021.

Hiariej, Eddy O.S, “United Nations Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, Februari 2019.

Khairandy, Ridwan , “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, Januari 2013.

Muryanto, Yudho Taruno, “Menakar Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Dalam Kasus Jiwasraya”, *Jurnal Rechtsvinding Online*, Desember 2020.

Natun, Julio Thimotius Kapitan Smaud , “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, Februari-Juli 2019.

Nugraha, Satriya, “Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1, Maret 2016.

Prakoso, Tamala Sari Martha, “Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY

jo.Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar)", *Jurnal Recidive*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014.

Romadhan, Rizal Choirul, "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

Satria, Hariman, "Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2020.

Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, "Peran Hakim dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif", *Jurnal Ratu Adil*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Tarigan, Berlian, "Polemik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat dan Memperkaya Diri bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Justia*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2020.

Timbo, David Putro, "Status Uang APBN yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal pada BUMN Persero", *Jurnal Law Reform*, Vol. 8, No. 2, Januari 2013.

Wibowo, Seno dan Ratna Nurhayati, "Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015.

Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia, "Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis)", *Jurnal Rechtsvinding*, Mei, 2020.

Wijaya, Ivan Satria, "Pertanggungjawaban Pengurus BUMN Terhadap Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Persero", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 2, 2015.

Tugas Akhir

Anfi, Lugis, 2020, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap BUMN (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)*, Skripsi, Program Studi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Salatiga.

Bangsa, Andi Srikandi Muslimah Puteri, 2018, *Analisis Normatif Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Habiburrohim, 2019, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN Persero*, Skripsi, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Lavenia, Nike Beauty, 2017, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-PUU/XIV/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Pratama, Danu Bagus, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi BUMN*, Skripsi, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613).

Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/201 tentang Pedoman Pengangkatan Anggora Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3732).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 perihal Pengadilan Tingkat Kasasi terhadap Karen Agustiawan dalam Kasus Korupsi PT Pertamina Hulu Energi, 9 Maret 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 perihal Gugatan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Mengenai Hasil Pemilihan Presiden 2019, 27 Juni 2019.

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst perihal Pengadilan Pertama terhadap Karen Agustiawan dalam Kasus Korupsi PT Pertamina Hulu Energi, 18 Januari 2019.

Putusan PT DKI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI perihal Pengadilan Tingkat Banding terhadap Karen Agustiawan dalam Kasus Korupsi PT Pertamina Hulu Energi.

Majalah

Martani, Dwi, “*Impairment Aset*”, *Majalah BUMN Track*, Januari 2012.

Internet

- Almatsier, Renville, “Blok BMG Bukan Pepesan Kosong”, <https://mediaindonesia.com/opini/253217/blok-bmg-bukan-pepesan-kosong-final>, diakses 25 Desember 2021.
- CNN, “Jaksa Akan Banding Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190613102545-12-402908/jaksa-akan-banding-vonis-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan>, diakses 17 Agustus 2021.
- Ferri, Oscar, “MA Tolak PK Eks Dirut Merpati Hotasi Nababan”, <https://www.liputan6.com/news/read/2320249/ma-tolak-pk-eks-dirut-merpati-hotasi-nababan>, diakses 20 Agustus 2021.
- Gideon, Arthur, “Kronologi Kasus Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan hingga Diputus Bebas”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4198244/kronologi-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-hingga-diputus-bebas>, diakses 17 Agustus 2021.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara, “Erick Thohir Terus Efisiensi BUMN”, <https://bumn.go.id/media/press-conference/erick-thohir-terus-efisiensi-bumn-uu>, diakses 17 Agustus 2021.
- Media Indonesia, “Saksi Sebut Kasus BMG Buat Praktisi Migas Dilematis”, https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/235042-saksi-sebut-kasus-bmg-buat-praktisi-migas-dilematis, diakses 25 Desember 2021.
- Pertamina Hulu Energi, “Pemegang Saham PT Pertamina Hulu Energi”, <http://phe.pertamina.com/ContentView.aspx?MenuID=kM9AXs68ThgdDyeANN9gsA==&TyeGroupContent=mELirpUhRYksFj7k8/XBcQ==&NewsCatID=9OYR9kUytIsLilKZieD5xg==>, diakses 25 Desember 2021.
- Setiawan, Riyan, “Mantan Dirut Pertamina Klaim Tak Ada Kerugian Negara dari Blok BMG”, <https://tirto.id/mantan-dirut-pertamina-klaim-tak-ada-kerugian-negara-dari-blok-bmg-ecaI>, diakses 25 Desember 2021.
- Wilkinson, Rick, “Cooper Energy buys into Basker-Manta-Gummy fields”, <https://www.ogj.com/general-interest/companies/article/17270409/cooper-energy-buys-into-baskermantagummy-fields>, diakses 25 Desember 2021.
- The Law Dictionary, “The Law Dictionary”, <https://thelawdictionary.org/>, diakses 10 September 2021.